

REVITALISASI PERTANIAN PENGGERAK UTAMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI INDONESIA

Aziz Budianta*

Abstract

At the implementation of the national development in reformation era, agriculture sectors becomes dominant sector that contributes national income and they are still the major occupation of Indonesian. These sectors are mainly done in rural areas, therefore, the study of agriculture sectors is dealt with the study of the development rural areas. The development rural areas is in many aspects, until now, it is relatively less than it is in the development in urban areas. In developing these sectors, it needs the strategies of the revitalization of agriculture sectors though the application of agro-industry systems, agribusiness, and the integrated agropolitan concept with the supporting infrastructure.

Keyword: *revitalization, rural area, agro-industry, agribusiness, agropolitan*

1. Pendahuluan

Sampai dengan dilaksanakannya pembangunan Nasional Negara Indonesia di era reformasi ini, fakta menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian terbesar penduduk Indonesia, merupakan sektor paling dominan (*leading sector*) dalam perekonomian Nasional, serta terbukti merupakan sektor yang paling tahan terhadap terpaan gelombang krisis ekonomi dan moneter selama ini. Usaha-usaha di sektor pertanian tersebut lebih banyak dilakukan di kawasan perdesaan (*rural area*). Dengan demikian setiap pembahasan sektor pertanian tidak akan lepas dengan pembahasan perkembangan kawasan perdesaan, demikian pula sebaliknya.

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki fungsi sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi utama di kawasan perdesaan adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini antara lain tercermin dari data ketenaga-kerjaan yang menunjukkan bahwa dari seluruh tenaga kerja yang bekerja di perdesaan pada tahun 2006 (57,30 juta orang atau 60,00% dari total tenaga kerja nasional), sebanyak 37,60 juta (65,70%) diantaranya bekerja di sektor pertanian (analisis Sakernas 2006 dalam Anonimus, 2007).

Selama dilaksanakannya pembangunan Nasional, di samping dampak positif berupa pertumbuhan fisik dan ekonomi, di sisi lain masih banyak diketemukan masalah dalam kaitan hubungan antara desa-kota (*rural-urban linkages*), diantaranya: masih terdapatnya kesenjangan yang tinggi antara pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan; hubungan desa-kota saling memperlemah dimana desa cenderung terkalahkan; terjadinya "*urban bias*", yaitu terjadinya kecenderungan kawasan perkotaan menguras sumberdaya perdesaan; keterbelakangan atau kemiskinan di perdesaan; rendahnya investasi di perdesaan; dan derasnya proses migrasi penduduk secara berlebihan dari perdesaan ke perkotaan (*over urbanization*) dan eksodus sumberdaya manusia unggul (*brain drained*) wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) ke kota-kota besar (terutama di Kawasan Barat Indonesia (KBI) (Anonimus, 2004).

Dalam perkembangannya selama ini kondisi kawasan perdesaan pada umumnya masih tetap dicirikan oleh masih besarnya jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternatif lapangan kerja, dan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja perdesaan. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya kendala seperti rendahnya tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani dan tingginya ketergantungan pada kegiatan budidaya pertanian (*on-farm*), lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi

* Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu

antara sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan dan jasa penunjang serta keterkaitan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat perdesaan, rendahnya akses masyarakat kepada sumber permodalan dan sumberdaya ekonomi produktif lainnya, serta terbatas dan belum meratanya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat (Anonimus, 2007).

Guna mengatasi dan memperbaiki kondisi kawasan perdesaan tersebut Pemerintah Negara Indonesia semenjak tahun 2007-an telah memberlakukan kebijakan yang diarahkan untuk penumbuhan kegiatan ekonomi non pertanian, antara lain melalui pengembangan Kawasan Agropolitan dan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan; peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perdesaan; serta peningkatan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat (*community based development*) dalam pembangunan dan/atau pemeliharannya, antara lain prasarana jalan, irigasi, air minum, listrik perdesaan, informasi, serta pos dan telekomunikasi.

2. Sektor Pertanian Penggerak Ekonomi Kawasan Perdesaan

Dalam konteks pembangunan Nasional, kedudukan kawasan perdesaan amat penting dan strategis. Beberapa faktor penyebab menjadi penting dan strategisnya perhatian terhadap kawasan perdesaan meliputi: (a) Kawasan perdesaan merupakan konsentrasi permukiman sebagian besar penduduk Indonesia dengan mata pencaharian utamanya adalah bertani; (b) Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, dapat menimbulkan kerisauan akan timbulnya rawan pangan pada masa yang akan datang; (c) Peranan kawasan perdesaan cukup penting dalam menjamin ketersediaan pangan, bahan mentah industri, lapangan kerja & pemberi sumbangan pendapatan nasional, dan juga secara *de facto* sebagai penjamin kelestarian sumberdaya lingkungan serta pengembang kultur daerah dalam menjaga kelestarian budaya (Anonimus, 2004). Penyokong utama pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan adalah sektor pertanian, yang didalamnya meliputi berbagai bidang usaha terkait pertanian

secara umum, meliputi: pertanian budidaya, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Secara umum sistem pertanian di kawasan perdesaan sampai sekarang masih menjadi rantai terlemah dari sistem ekonomi Nasional. Hal ini tercermin dari rendahnya produktivitas pertanian dan masyarakat pertanian, serta tingginya angka kemiskinan masyarakat pertanian. Pembangunan pertanian yang dilaksanakan selama ini lebih banyak dikonsentrasikan pada kegiatan produksi atau budidaya, melalui pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam (*on-farm*) khususnya tanaman pangan. Sementara pembangunan pertanian pada sisi *off-farm*-nya (seperti pengembangan industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, kegiatan pemasaran, serta jasa-jasa pendukungnya) kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Pengalaman menunjukkan bahwa dengan pembangunan pertanian yang melulu budidaya/produksi saja dan tidak disertai dengan implementasi kegiatan *off farm*-nya secara harmonis dan berkelanjutan/simultan, menyebabkan sumbangan sektor pertanian kurang optimal dalam pembangunan ekonomi daerah dan Negara. Oleh karena itu program-program pengembangan pertanian dan penyediaan bahan pangan harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat petani dan masyarakat desa, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan nilai tambah (*added value*) pertanian dan bahan pangan bagi masyarakat petani, melalui hubungan industrial antara pertanian pangan dan sektor-sektor perekonomian lainnya.

3. Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan di dalamnya meliputi kawasan-kawasan yang lebih kecil dengan kondisi dan fungsi tertentu yang saling berbeda. Perkembangan antar bagian kawasan akan saling berbeda, tergantung pada potensi sumberdaya alam (*natural resources*), sumberdaya manusia (*human resources*), dan kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang hidup di dalamnya. Kawasan perdesaan yang mempunyai potensi dan kondisi yang mendukung perkembangan, dengan demikian akan lebih menonjol pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan kawasan lainnya. Kawasan inilah yang disebut dengan 'kawasan potensial' atau 'kawasan strategis perdesaan'.

Kawasan potensial atau kawasan strategis

perdesaan biasanya diindikasikan dengan unit-unit satuan simpul pusat pengembangan kegiatan, yang apabila disentuh/dirangsang secara tepat akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan kawasan itu sendiri, dan bahkan dimungkinkan dampaknya akan menjalar ke kawasan lain disekitarnya melalui mekanisme 'efek percepatan (*spread effect*)' dan/atau 'efek tetesan ke bawah (*trickling down effect*)'. Terdapat kawasan strategis perdesaan yang secara alamiah dapat tumbuh dan berkembang secara cepat, namun terdapat pula kawasan strategis yang tidak dapat tumbuh dan berkembang secara cepat tanpa distimulir dan campur tangan dari luar, terutama pada kawasan-kawasan yang masih bersifat tradisional dan lokasinya terisolasi/ terpencil (Aziz Budianta, 2008).

Pendekatan pengembangan kawasan perdesaan bersama dengan pengembangan kegiatan-kegiatan pertanian mendapat perhatian yang lebih khusus, melalui pendekatan pengembangan Kawasan Agropolitan (Kota Pertanian) dan Kawasan Pertumbuhan Perdesaan (Desa Pusat Pertumbuhan/DPP). Pendekatan agropolitan telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan semenjak 10 (sepuluh) tahun terakhir, karena pendekatan ini memungkinkan dilakukannya pengembangan pertanian dan kawasan perdesaan bersama-sama dengan pengembangan perkotaan. Konsep agropolitan bertujuan mengurangi disparitas wilayah (*regional disparity*) sebagai akibat terjadinya polarisasi pertumbuhan di kota-kota besar, dengan jalan desentralisasi pusat-pusat pertumbuhan pada daerah perdesaan yang berpotensi menjadi kutub pertumbuhan baru (*new growth poles*) bagi pengembangan wilayah perdesaan. Program pengembangan kawasan agropolitan pada pusat pertumbuhan kawasan agribisnis adalah merupakan salah satu upaya dalam merealisasikan konsep agropolitan dengan pendekatan pengembangan sistem dan usaha agribisnis.

Sedangkan pendekatan kawasan pertumbuhan perdesaan ditangani oleh Satker Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Desa Pusat Pertumbuhan Ditjen Cipta Karya DPU yang menitik-beratkan pada identifikasi dan pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Pusat Pengembangan Desa (P2D) pada dasarnya merupakan program pembangunan kawasan perdesaan, untuk dapat menciptakan keseimbangan wilayah antara kawasan perdesaan dan perkotaan.

Program P2D dalam penanganannya menyentuh dan menggarap potensi lokal dalam berbagai bidang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat tanpa harus meninggalkan desanya, mengoptimalkan fungsi kawasan perdesaan dalam menampung kegiatan masyarakat, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

Kedua pendekatan pengembangan kawasan perdesaan tersebut esensinya merupakan proses urbanisasi kawasan perdesaan, yaitu upaya pengembangan dan pembentukan kawasan perdesaan sehingga mempunyai ciri-ciri perkotaan dengan pemenuhan berbagai prasarana dan sarana seperti halnya yang dimiliki oleh kawasan perkotaan, terutama prasarana dan sarana pendukung usaha pertanian. Selama ini terdapat 2 (dua) kebijaksanaan pengarah urbanisasi di Indonesia yang dikembangkan. Pertama, pengembangan kawasan perdesaan agar memiliki ciri kawasan perkotaan, yang dikenal dengan istilah 'urbanisasi perdesaan'. Kedua, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, atau dikenal dengan istilah 'daerah penyangga pusat pertumbuhan'. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mempercepat tingkat urbanisasi tanpa menunggu pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan melakukan beberapa terobosan yang bersifat non-ekonomi. Perubahan tingkat urbanisasi tersebut diharapkan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu didorong pertumbuhan kawasan perdesaan agar memiliki ciri-ciri kawasan perkotaan. Dengan demikian, penduduk kawasan tersebut dapat dikategorikan sebagai 'orang kota' walaupun sebenarnya mereka masih tinggal di suatu kawasan yang memiliki nuansa perdesaan. Dengan konsep tersebut, dikenal istilah wisata pantai atau kota pantai, desa wisata agribisnis, dsb. Kebijakan kedua adalah mengembangkan kota-kota kecil dan sedang yang selama ini telah ada untuk mengimbangi pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan (Salim, Fahrudi, 2006), dan juga berkontribusi menahan laju mobilitas penduduk perdesaan ke perkotaan, terutama penduduk terpelajar dan berkeahlian tertentu dalam bidang usaha pertanian.

4. Revitalisasi Pertanian dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan

Dalam rangka menjawab semua tantangan dalam pembangunan Indonesia tahun 2004 – 2009, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga agenda

pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) tahun 2004 – 2009 (Perpres No. 7/2005) meliputi: (a) menciptakan Indonesia yang aman dan damai, (b) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, serta (c) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Khusus terkait agenda yang ketiga, prioritas pembangunan dan arah kebijakannya adalah: penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, peningkatan investasi, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan antar wilayah, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, pembangunan kependudukan yang berkualitas, dan percepatan pembangunan prasarana dan sarana/infrastruktur (Sri Mulyani Indrawati, 2005).

Berdasarkan berbagai penelitian dan tinjauan kebijakan pengembangan sektor pertanian, revitalisasi pertanian melalui pengembangan agroindustri di kawasan perdesaan merupakan pilihan yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kemampuan yang tinggi dari agroindustri dalam penyerapan tenaga kerja, mengingat sifat industri pertanian yang padat karya dan bersifat massal. Industri pertanian yang berbasis pada masyarakat tingkat menengah dan bawah ini merupakan sektor yang sesuai untuk menampung banyak tenaga kerja dan menjamin perluasan berusaha sehingga akan efektif dalam upaya meningkatkan ekonomi kawasan perdesaan (Anonimus, 2005). Upaya revitalisasi sektor pertanian di Indonesia ini merupakan revolusi hijau (*green revolution*) babak/tahap kedua di Indonesia (Nainggolan, K., 2008).

Pada saat ini sumberdaya ekonomi yang dimiliki setiap daerah dan siap didaya-gunakan untuk pembangunan ekonomi daerah adalah sumberdaya agribisnis seperti sumberdaya alam (lahan, air, keragaman hayati, agro-klimat), sumberdaya manusia di bidang agribisnis, teknologi di bidang agribisnis, dll. Oleh karena itu, untuk membangun ekonomi daerah pilihan yang paling rasional adalah melalui percepatan pembangunan agribisnis. Dengan kata lain, pembangunan agribisnis dijadikan pilar pembangunan ekonomi wilayah. Kontribusi sektor agribisnis dalam perekonomian dapat diukur dengan berbagai

indikator seperti: kontribusi dalam pembentukan GDP, kesempatan kerja, perdagangan internasional, kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah, ketahanan pangan nasional (*national food security*), dan kelestarian lingkungan hidup (Anonimus, 2006b).

Integrasi antara konsep agroindustri dan pembangunan desa menjadi penting keterkaitannya dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi, penyediaan dana dan investasi, teknologi, serta dukungan sistem tata niaga dan perdagangan yang efektif. Pengembangan agroindustri pada dasarnya diharapkan selain memacu pertumbuhan tingkat ekonomi, juga sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Wibowo (1997) dalam Kuntoro BA (2006) mengemukakan perlunya pengembangan agroindustri di pedesaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar diantaranya: (a) memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap wilayah; (b) memacu peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan; (c) memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan; (d) memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-subsitem agribisnis; (e) menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan. Untuk mengaktualisasikan secara optimal strategi tersebut, perumusan perencanaan pembangunan pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas dapat menghasilkan output yang optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pembangunan wilayah. Pengalaman yang sangat berharga bagi kita selama ini menjelaskan bahwa program pembangunan kawasan perdesaan kurang terkoordinasi dalam suatu sistem yang baik dalam konteks sumberdaya maupun secara fungsional seringkali kurang menjamin dalam 3 (tiga) hal meliputi: daya tahan (*endurance*), keutuhan (*integrity*), dan kesinambungan (*continuity*) (Kuntoro BA, 2006).

Untuk mengembangkan kawasan perdesaan menjadi pusat pengembangan agribisnis diperlukan dukungan berbagai prasarana dan sarana (*infrastructure*) pada setiap sub sistem agribisnis, meliputi: sub sistem hulu, sub sistem usaha tani, sub sistem pengolahan, sub sistem pemasaran, serta

sub sistem penunjang dan jasa. Berbagai jenis prasarana dan sarana pendukung pengembangan sistem agribisnis di kawasan perdesaan tersebut dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Prasarana dan Sarana Pendukung Pengembangan Sistem Agribisnis di Kawasan Perdesaan (Diperinci Per Sub Sistem Agribisnis)

Sistem Agribisnis	Prasarana dan Sarana	Rincian Jenis Prasarana dan Sarana
Sub Sistem Hulu (<i>Up-Stream Agribusiness</i>)	a. Pengadaan Benih/Bibit	Produsen benih, Produsen bibit, Kios, Gudang, dsb
	b. Pengadaan Pupuk & Obat-Obatan	Produsen/pabrik pupuk, Produsen kompos, Kios, Gudang, dsb
	c. Pengadaan Alat & Mesin Pertanian	Produsen mesin, Produsen alat-alat pertanian, Kios, Gudang, dsb
Sub Sistem Usaha Tani (<i>On-Farm Agribusiness</i>)	a. Pengolahan Tanah	Mesin/traktor; Cangkul, Sabit, Garpu, dsb
	b. Pembibitan	Lahan/areal pembibitan, Alat pembibitan, dsb
	c. Penanaman	Cangkul, Garpu, dsb
	d. Pemeliharaan	Cangkul, Sabit, Pisau, <i>Sprayer</i> , dsb
	e. Pengairan	Irigasi teknis, Irigasi semi teknis, Irigasi sederhana, Saluran drainase
	f. Pemanenan	Mesin panen (<i>thresher</i>), Sabit, Ani-ani, Ketam
	g. Lingkungan Usaha Tani	Jalan kebun, Gerobag, Gerobag mesin, Truk pengangkut, Saung, <i>Shelter</i> distribusi
Sub Sistem Pengolahan (<i>Down-Stream Agribusiness</i>)	a. Pengumpulan Hasil	Tempat pengumpulan hasil sementara, Gudang/lumbung, <i>Hall</i> (sortasi), <i>Loading-unloading</i>
	b. Pengepakan	<i>Packing house</i> , Kemasan, Sarana air bersih
	c. Pengolahan	<i>Hall</i> (sortasi), Tempat pengolahan air kotor, Tempat pembuangan sampah, Pengupasan, Pengolahan Lanjutan
Sub Sistem Pemasaran	a. Distribusi Hasil	Jalan regional, Shelter, Mobil angkutan, Angkutan regional
	b. Pemasaran	Pasar lokal, Pasar Regional, Supermarket, Terminal agribisnis, Terminal ekspor
Sub Sistem Penunjang & Jasa	a. Permodalan/Keuangan	Perbankan, Koperasi, Asuransi
	b. Pendidikan/Latihan	Balai penyuluhan, Pusat informasi, Balai pertemuan, Litbang
	c. Kegiatan Sosial	Sarana-sarana: Kesehatan, Ibadah, Pendidikan, Olah raga, Rekreasi, Listrik, Telefon

Pembangunan sektor pertanian haruslah sinergi dengan pembangunan kawasan pedesaan, dimana memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan poin tersebut, dapat dipaparkan bahwa industrialisasi pertanian seharusnya membawa cakrawala baru dalam pembangunan pedesaan. Meningkatkan produktivitas pertanian harus diikuti oleh peningkatan investasi dalam pertanian modern beserta industri pengolahan dan sektor jasa lainnya di desa. Pengembangan kawasan potensial dengan basis pedesaan sebagai pusat pertumbuhan akan mentransformasikan pedesaan menjadi kota-kota pertanian (*agropolis*). Perkotaan pertanian ini diharapkan dapat mengimbangi interaksi antar wilayah secara sehat yang dapat menimbulkan aspek positif lainnya yaitu mengurangi arus mobilitas penduduk ke kawasan perkotaan. Di samping nilai tambah produksi pedesaan akan meningkat, industrialisasi juga akan mencegah berkembangnya pengangguran terdidik di desa, dan mendorong mereka untuk tetap bekerja dan berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya, yang juga sebagai pusat-pusat pertumbuhan (Kuntoro BA, 2006).

5. Strategi Pengembangan Kawasan Pedesaan

Upaya pembangunan kawasan pedesaan dalam rangka memperbaiki kondisi umum sebagai kawasan ekonomi produktif dan permukiman yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan perkotaan, ke depan diperkirakan masih akan menghadapi kendala dan tantangan seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain: (a) lemahnya koordinasi dan keterpaduan kegiatan antar pelaku (*stakeholders*) pembangunan (antara pemerintah, masyarakat, dan kalangan swasta) dan antar sektor dalam rangka mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi kawasan pedesaan yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian (*on-farm*), industri, dan jasa penunjangnya (*off-farm*), serta keterkaitan spasial antara kawasan pedesaan dan perkotaan; (b) kurangnya peran lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan termasuk fasilitator pembangunan dalam menggerakkan perekonomian di kawasan pedesaan; (c) lemahnya kapasitas dan kemandirian pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat pedesaan yang menjadi kewenangannya; serta (d) tuntutan banyaknya penyediaan dan kualitas prasarana dan

sarana (*infrastructure*) kawasan pedesaan secara merata di seluruh pelosok tanah air.

Dalam rangka mendorong pertanian yang integratif dari hulu ke hilir di masa depan, harus ada insentif ekonomi untuk merealisasikan potensi-potensi yang ada di kawasan pedesaan yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Serangkaian kebijakan harus dirancang dalam proses transformasi tersebut meliputi (Nainggolan, K., 2008): (a) pemberdayaan masyarakat miskin di kawasan pedesaan dan penguatan organisasi/ kelembagaannya; (b) peningkatan akses terhadap sumberdaya (seperti lahan, air, dan hutan) serta teknologi; (c) melestarikan dan membina teknologi dan budaya lokal; (d) pentingnya pendidikan masyarakat desa dan ketahanan pangan; (e) peningkatan akses modal dan pasar; (f) stimulus fiskal guna meningkatkan pertumbuhan pertanian; (g) kebijakan industri difokuskan ke agroindustri pedesaan untuk mendekatkan industri ke sentra produksi, serta menciptakan 'satu juta pekerjaan per tahun' di kawasan pedesaan; (h) kebijakan perdagangan yang memberikan insentif bea masuk yang adil untuk melindungi petani dari produk impor pertanian dari luar negeri yang lebih murah akibat adanya subsidi; dan (i) meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) murni dan terapan.

Sementara itu Pemerintah melalui Departemen Pertanian juga telah menentukan sasaran pembangunan pedesaan pada tahun 2008 - 2009 meliputi (Anonimus, 2007):

- a. Terciptanya perluasan kesempatan kerja di pedesaan, terutama lapangan kerja baru di bidang kegiatan agribisnis *off-farm* dan industri serta jasa berskala kecil dan menengah, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat pedesaan;
- b. Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial-ekonomi pedesaan dalam mendorong kemajuan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan;
- c. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pedesaan secara lebih merata di seluruh tanah air dalam rangka mempercepat terciptanya kawasan pedesaan sebagai kawasan permukiman dan ekonomi produktif

yang layak huni dan sejahtera, yang ditandai antara lain dengan: (1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan perdesaan, terutama yang menghubungkan sentra produksi pertanian dan non pertanian di kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan yang terdekat; (2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan usaha ekonomi kawasan perdesaan seperti: pasar desa, sentra pengolahan produksi, dan fasilitas pergudangan; (3) Tersedianya 28 ribu satuan sambungan telepon baru di 10 ribu desa; (4) Tersedianya 37 pusat informasi masyarakat (*community access point*), dan berfungsinya kantor pos sebagai pusat informasi masyarakat; dan (5) Tercapainya tingkat elektrifikasi perdesaan sebesar 87,00%.

Arah pembangunan kawasan perdesaan tahun 2008 - 2009 adalah pada perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi di kawasan perdesaan untuk mendukung upaya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2008 - 2009. Kebijakan tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mendorong perluasan kegiatan ekonomi non pertanian yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri, dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, antara lain melalui pengembangan Kawasan Agropolitan dan pengembangan UMKM di bidang usaha unggulan daerah (sektor basis) yang memiliki keterkaitan usaha ke depan (*forward linkages*) dan ke belakang (*backward linkages*) yang kuat;
- b. Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat kawasan perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi lokal serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang antara lain berupa budaya gotong-royong dan jaringan kerjasama, untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; dan
- c. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perdesaan secara merata di seluruh tanah air, antara lain jalan desa, jaringan irigasi, prasarana air minum dan penyehatan lingkungan/sanitasi permukiman, listrik perdesaan, pasar desa, serta pos dan telekomunikasi.

6. Kesimpulan

- a. Sektor pertanian dalam sistem pembangunan Nasional Negara Indonesia di era reformasi ini, sudah sepantasnya mendapatkan perhatian besar dan proporsional sebagai sektor andalan perekonomian Nasional. Fakta menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian terbesar penduduk Indonesia (\pm 60%), serta terbukti merupakan sektor yang paling tahan terhadap terpaan gelombang krisis ekonomi dan moneter selama ini. Usaha-usaha di sektor pertanian tersebut lebih banyak dilakukan di kawasan perdesaan, sehingga pembangunan sektor pertanian tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan kawasan perdesaan, demikian pula sebaliknya;
- b. Selama ini kawasan perdesaan masih dicirikan oleh besarnya jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternatif lapangan kerja, dan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja perdesaan, yang disebabkan oleh adanya kendala seperti rendahnya tingkat penguasaan lahan pertanian rumah tangga petani dan tingginya ketergantungan pada kegiatan budidaya pertanian, lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan dan jasa penunjang, serta keterkaitan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat perdesaan, rendahnya akses masyarakat kepada sumber permodalan dan sumberdaya ekonomi produktif lainnya, serta terbatas dan belum meratanya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat;
- c. Pemerintah Negara Indonesia semenjak tahun 2007-an telah menempuh kebijakan yang diarahkan untuk penumbuhan kegiatan ekonomi non pertanian di kawasan perdesaan, antara lain melalui pengembangan Kawasan Agropolitan dan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP); peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perdesaan; serta peningkatan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan/atau pemeliharaannya;
- d. Revitalisasi sektor pertanian perlu dilakukan di kawasan perdesaan secara terpadu melalui pengembangan konsep agroindustri, usaha

agribisnis, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan yang didukung oleh berbagai kebijakan dan strategi pengembangan yang tepat dan terencana, serta ketersediaan prasarana dan sarana penunjang usaha agribisnis, untuk menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kontribusi dalam pembentukan GDP, ketahanan pangan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

6. Daftar Pustaka

Anonimus, 2004. *Konsep Dasar Pengembangan Kawasan Agropolitan*. Jakarta: Depkimpraswil Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan.

_____, 2005. *Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Tahun 2004 - 2009*. Jakarta: Kesekretariatan Negara.

_____, 2006a. *Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) di Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah*. Jakarta: Dirjen Cipta Karya DPU Satker Pembinaan dan Pengendalian PS DPP bekerja sama dengan PT Polatek Rancang Bangun.

_____, 2006b. *Membangun Sistem Agribisnis sebagai Penggerak Ekonomi Nasional*. Jakarta: Departemen Pertanian.

(<http://www.deptan.go.id/konsep/konsep.htm>; 12 Agustus 2007)

_____, 2007. *Pembangunan Perdesaan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Pengembangan Perdesaan.

(http://www.pu.go.id/Ditjen_SDA/ditjen_desa/warta/Sep/mengembangkan%20.htm; 12 Agustus 2007)

Aziz Budianta, 2008. *Penyusunan Program Pengembangan Kawasan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP Torue) Kab. Parigi Moutong*, Laporan Penelitian Mandiri. Palu: Jurusan Teknik Arsitektur Untad

Kuntoro BA, 2006. *Perspektif Pembangunan Wilayah Perdesaan*, Majalah Inovasi Vol.

6/XVIII/Maret 2006 dalam Situs PPI Online.

(<http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=153>; 12 Agustus 2007)

Nainggolan, K., 2008. *Melawan Kelaparan dan Kemiskinan Abad Ke-21*, Cetakan I (Mei). Bogor: Kekal Press.

Salim, Fahrudi, 2006. *Urbanisasi, Desa-Kota, Pusat Pertumbuhan*. Bandung: Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Univ. Padjajaran.

(<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0611/10/opi01.html>; 12 Agustus 2007)

Sri Mulyani Indrawati, 2005. *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) Negara Indonesia Tahun 2005*.